

LENTERA

Inspirasi Perubahan

CAK IMIN DAN HANIF DHAKIRI BISA DIPANGGIL KPK

Proses kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemenaker oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Bahkan, KPK membuka peluang untuk memanggil dan meminta keterangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019, Hanif Dhakiri, sebagai saksi. Dalam kasus ini, pada 5 Juni 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker. Mereka yaitu Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Bahkan, KPK mengungkapkan para tersangka ini telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA dalam kurun waktu 2019–2024.

BACA HAL 11...

KRONOLOGI KASUS PEMERASAN RPTKA DI KEMENAKER



Sejak 2012 - Awal Praktik Pemerasan

- KPK menyebut pemerasan dalam proses pengurusan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sudah terjadi sejak era Cak Imin (Menakertrans)
- Pemerasan berlanjut di era Hanif Dhakiri (2014–2019) dan Ida Fauziyah (2019–2024) — semuanya dari PKB.



2019-2024 - Modus dan Skema

- RPTKA adalah dokumen wajib bagi perusahaan untuk mempekerjakan TKA. Tanpa itu, TKA bisa dianggap ilegal dan dikenai denda Rp 1 juta/hari/TKA.
- Oknum pejabat dan staf di Direktorat PPTKA memperlambat proses, lalu menagih "biaya tambahan" agar RPTKA bisa segera disetujui.
- Permintaan uang dilakukan secara sistematis melalui staf pelaksana dan disetorkan ke pejabat tinggi.

Total dugaan pemerasan: Rp 53,7 miliar



Haryanto, Dirjen Binapenta 2024–2025, terima Rp 18 miliar (paling besar).



Gatot Widiartono, Koordinator TKA, terima Rp 6,3 miliar.



Devi Anggraeni, Direktur PPTKA 2024–2025, terima Rp 2,3 miliar.



Wisnu Pramono, Direktur PPTKA 2017–2019, terima Rp 580 juta.



Suhartono, Dirjen Binapenta 2020–2023, terima Rp 460 juta.



Putri Citra Wahyoe (PCW), staf PPTKA, terima Rp 13,9 miliar.



2025 - Tindakan KPK & Dampak

- KPK tetapkan 8 tersangka, periksa eks stafsus, anggota DPR, dan pejabat aktif. Cak Imin dan Hanif Dhakiri berpeluang dipanggil untuk klarifikasi.
- **Disita:** 11 mobil dan 2 motor. Kasus dikembangkan ke TPPU (pencucian uang).
- Agen TKA mengaku diminta bayar Rp 1–1,5 juta per permohonan RPTKA. Suap dianggap "hal biasa", tergantung kedekatan dengan pejabat.
- Menurut Transparency International Indonesia, akar masalahnya ada pada sistem perizinan yang longgar, tertutup, dan penuh celah suap.
- Kemenaker diminta lakukan reformasi menyeluruh:
 - Batasi diskresi pejabat
 - Tingkatkan transparansi proses
 - Sediakan kanal pengaduan yang aman



KPK



TANAH TERLANTAR DUA TAHUN BISA DIAMBIL PEMERINTAH

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan secara ekonomi maupun pembangunan selama lebih dari dua tahun berpotensi ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kemudian tanah terlantar tersebut bisa diambil pemerintah.

Meski begitu, Nusron mengatakan proses penetapan tanah terlantar tidak terjadi seketika. Ia berujar, terdapat sejumlah proses bertahap yang akan dilakukan pemerintah. "Ada tahapan administrasi dan surat peringatan berjenjang, dengan total durasi proses sekitar 587 hari," kata Nusron dalam keterangan tertulis, diterima Rabu (16/7/2025).

Nusron menekankan, ketentuan ini tidak berlaku untuk tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), termasuk tanah warisan. "Tanah SHM tidak memiliki batas waktu pemanfaatan dan tetap dapat diwariskan antar generasi," ujarnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid menyampaikan, pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar. Hal ini disampaikan Nusron saat hadir dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 13 Juli 2025.

"Policy-nya terhadap yang sudah terpetakan dan bersertifikat manakala sejak dia disertifikasikan, dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan," kata Nusron.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa proses penyitaan dilakukan bertahap. Tahap awal dilakukan proses peringatan kepada pemilik lahan akan dilakukan secara bertahap. Tahapan dimulai dari pemberitahuan awal, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

Setelah itu, jika dalam kurun waktu

total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, tanah tersebut akan dikategorikan terlantar. Tanah terlantar, dapat didistribusikan oleh pemerintah pusat sebagai objek land reform atau reforma agraria.

"Langkah pertama adalah BPN kirim surat. Tiga bulan dikasih kesempatan. Tiga bulan masih tidak ada aktivitas, kirim surat, peringatan pertama. Tiga bulan lagi dikirim surat, tidak ada keterangan lagi, peringatan kedua," terangnya.

"Tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih kesempatan lagi, tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih waktu enam bulan untuk melakukan perundangan. Masih tidak ada aktivitas lagi, maka pemerintah menetapkan itu menjadi tanah terlantar," sambung Nusron.

Adapun tanah yang menjadi objek land reform dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok yang tidak memiliki atau kekurangan lahan. Semisal, kata Nusron didistribusikan kepada berbagai organisasi masyarakat (Ormas), termasuk PB IKA-PMII, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Muhammadiyah.

Nusron menekankan ATR memang menentukan objek tanah terlantar, tapi kepala daerah yang nantinya memutuskan subjek atau kepada siapa lahan nganggur itu diberikan.

"Itu siapa-siapanya itu (penerima hak tanah terlantar) adalah kepala daerah. Rasa-rasanya kalau kepala daerahnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, nah ini enak. Karena rata-rata kepala daerah di situ diaudit oleh Pak Fathan (Anggota VI BPK sekaligus Ketua PB IKA PMII 2025-2030), biasanya takut. Tinggal nitip subjeknya di situ, nanti kami



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

tinggal tanda tangan. Ini sebetulnya namanya kolaborasi," ucapnya.

Sedangkan jalur kedua adalah 'titip' langsung kepada Ketua PB IKA PMII 2025-2030 Fathan Subchi. Nusron berkelakar bahwa para bupati dan wali kota hanya takut kepada aparat yang memeriksa dan menghukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena keputusan pemeriksaan BPK itu final dan binding, sudah final dan mengikat. Kalau tiba-tiba pertemuan ditindaklanjuti APH (aparat penegak hukum), mules langsung. Karena itu efektif. Ini Pak Fathan ini cerdas, lebih cerdas daripada politisi yang lain. Mengambil posisi representasi dari PKB menjadi anggota BPK, efektif ini," tegas Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengatakan bahwa negara sudah mengamankan 1,4 juta hektare tanah terlantar dan siap dibagikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Lahan tersebut dinilai nganggur karena masa hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang diberikan kepada para penerima sudah kedaluwarsa. Sehingga ada 4 opsi untuk pengelolaan tanah-tanah IP4T tersebut.

Pertama, ditawarkan ulang kepada pemegang hak lama dengan komitmen baru. Kedua, dialihkan kepada pihak lain yang punya proposal lebih bagus. Ketiga, disimpan di Badan Bank Tanah jika memang belum ada peminatnya.

"Potensi keempat adalah dimasukkan menjadi TCUN. Apa itu TCUN? Tanah cadangan untuk negara. Jadi, sewaktu-waktu negara meminta

mau dipakai untuk membangun Sekolah Rakyat, membangun Sekolah Garuda, dibangun untuk nyetak sawah dalam rangka ketahanan pangan mengambilnya dari sini. Supaya kita enggak lagi babat hutan, tapi memanfaatkan yang ada ini," kata Nusron dalam Diskusi Publik Pengukuhan dan Rakernas PB IKA-PMII 2025-2030 di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Sedangkan ketentuan soal pengambilalihan tanah nganggur milik masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Itu adalah beleid warisan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Batas waktu yang diberikan negara adalah 2 tahun plus 587 hari sampai akhirnya objek tersebut sah ditetapkan sebagai tanah terlantar. "Itu totalnya (tanah terlantar) ada 1,4 juta hektare secara nasional," kata Nusron

Tanah terlantar itu diambil kembali oleh negara karena diklaim tak dimanfaatkan oleh pemegang sertifikat. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 55,9 juta hektare alias 79,5 persen tanah bersertifikat di Indonesia.

Nusron kemudian mengobrol tanah-tanah nganggur itu kepada ormas keagamaan. Ormas itu meliputi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), hingga Persatuan Ummat Islam (PUI). Begitu pula untuk organisasi mahasiswa ekstra kampus (ormek), termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

"Di sinilah sebetulnya peluang daripada sahabat-sahabat sekalian keluarga besar PMII, keluarga besar NU, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar yang lain untuk mengisi ruang ini. Nah, ini saya baru cerita yang sudah terpetakan dan bersertifikat sehingga peluangnya yang bapak-bapak bisa lakukan itu ada 1,4 juta hektare," tuturnya.

Nusron mengaku sudah memetakan tanah-tanah tersebut lengkap dengan luas dan lokasinya. Ia hanya mencontohkan tanah seluas 500 hektare dianggap terlalu kecil untuk para pemain di Jakarta. Sebaliknya, tanah dengan luasan yang sama dinilai sudah cukup besar bagi pemain-pemain di daerah. (ist/lut)

"Policy-nya terhadap yang sudah terpetakan dan bersertifikat manakala sejak dia disertifikasikan, dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan,"

NUSRON WAHID
Menteri ATR/Kepala BPN,



Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati.

JABATAN HAKIM PERLU DIATUR DALAM UU

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati mengatakan bahwa jabatan hakim perlu diatur dalam Undang – Undang (UU). Karena itu dia menegaskan bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan sistem hukum nasional, meskipun RUU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029.

Lidya juga menyoroti pentingnya posisi hakim dalam struktur negara hukum yang menjunjung prinsip rule of law. Kemudian juga perlunya pengaturan menyeluruh mengenai jabatan hakim dalam satu sistem hukum yang terpadu.

“Jabatan hakim bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan jabatan yang sarat dimensi konstitusional, filosofis, dan sosial. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur jabatan hakim,” tegasnya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Secara luas Lidya menjabarkan bahwa sampai saat ini belum ada UU khusus terkait dengan jabatan hakim. Meski demikian, pengaturan mengenai hakim tersebar di berbagai undang-undang seperti UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial, maupun UU Peradilan Umum.

Banyaknya pengaturan tentang

hakim tersebut membuktikan bahwa pengaturan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang utuh. Sehingga RUU tentang jabatan hakim ini menjadi urgen.

Lidya memaparkan empat urgensi utama pembentukan RUU Jabatan Hakim. Pertama, dari sisi konstitusional, Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang juga menuntut adanya perlindungan hukum terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya.

“Kedua, dari perspektif good governance, harus ada standar yang jelas mengenai rekrutmen, jenjang karier, evaluasi kinerja, hingga sistem disiplin dan kesejahteraan hakim. Tanpa itu, muncul potensi penyalahgunaan wewenang atau intervensi dalam proses peradilan,” ungkapnya.

Ketiga, ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan etik yang efektif dan tegas terhadap hakim, tanpa mengganggu independensi lembaga peradilan. Terakhir, Lidya menekankan bahwa profesi hakim sangat rentan terhadap tekanan dan ancaman, terutama saat menangani perkara sensitif.

“Karena itu, RUU Jabatan Hakim juga harus memuat perlindungan hukum, jaminan keamanan pribadi, dan kesejahteraan yang layak agar hakim dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan berintegritas,” pungkasnya.

Badan Keahlian DPR RI akan terus mendorong dialog akademik dan konsultasi publik guna membangun kesadaran kolektif tentang urgensi pengaturan jabatan hakim yang komprehensif dalam sistem perundang-undangan nasional.

Lidya juga mengharapkan supaya Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu

memiliki payung hukum khusus mengenai jabatan hakim.

“Jika kita menengok praktik di berbagai negara yang menganut sistem civil law maupun common law, hampir semuanya sudah memiliki undang-undang khusus tentang hakim, seperti Richtergesetz di Jerman, Act on the Status of Judges di Jepang, atau Judges' Remuneration Act di Singapura. Mereka menempatkan profesi hakim sebagai profesi yang dihormati, dilindungi, sekaligus diawasi secara ketat,” jelasnya.

Menurut Lidya, keberadaan RUU Jabatan Hakim di Indonesia akan membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, RUU ini

akan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman agar benar-benar bebas dan tidak memihak. Kedua, menjadi instrumen hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh lembaga peradilan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa RUU tersebut akan mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas hakim, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan pengadilan. “Jika hakim-hakim kita lebih profesional dan berintegritas, maka keadilan

substantif akan lebih tercapai dalam setiap proses peradilan,” tegasnya.

Lidya juga meyakini bahwa kehadiran RUU ini akan memperkuat legitimasi negara hukum Indonesia di mata publik. “Masyarakat akan lebih percaya pada lembaga peradilan. Ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah peradilan,” pungkasnya.

Badan Keahlian DPR RI terus membuka ruang konsultasi publik dan dialog akademik untuk memastikan bahwa substansi RUU Jabatan Hakim benar-benar menjawab kebutuhan reformasi hukum dan keadilan di Indonesia.

RUU tentang jabatan hakim ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Ketua Umum Alumni Society of Asian Law Students Association (ASA) Indonesia, Sonia Ramadhani, mengatakan perlunya mengembalikan RUU Jabatan Hakim dalam prolegnas dengan mengajak serta stakeholders terkait dari lembaga yudikatif untuk proses pembahasan RUU Jabatan Hakim.

Sonia mengatakan masih terdapat pro dan kontra mengenai muatan draf RUU Jabatan Hakim yang terakhir. Terlepas dari itu, terdapat beberapa muatan pasal yang memiliki semangat baik untuk melindungi profesi hakim dan memperjelas tupoksi.

Lebih lanjut, kata dia, stakeholders terkait dari lembaga yudikatif diharapkan dapat turut menyempurnakan muatannya. Namun demikian, amat disayangkan bahwa RUU Jabatan Hakim mengalami tarik-ulur dalam prolegnas DPR RI.

“Oleh karena itu, ASA Indonesia akan mengawal konkrit supaya hal-hal di atas terpenuhi, antara lain dengan mengadakan kajian-kajian lanjutan dengan shareholders terkait serta bersurat kepada pejabat terkait dari elemen legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Ia mengatakan ASA Indonesia memandang profesi hakim penting untuk dijamin kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan tupoksi Hakim sangat sentral untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang profesional dan independen, demi tercapainya keadilan dan penegakan hukum berdasarkan antara lain UUD 1945 dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(rls,ist/lut)

“Jika hakim-hakim kita lebih profesional dan berintegritas, maka keadilan substantif akan lebih tercapai dalam setiap proses peradilan. Masyarakat akan lebih percaya pada lembaga peradilan. Ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah peradilan,”

Dr. Lidya Suryani Widayati
Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI,

YAKIN RUPIAH DAN INFLASI STABIL, BI RATE DIPANGKAS JADI 5,25 PERSEN

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) Bulan Juli 2025, akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI-rate sebesar 25 basis poin (BPS) menjadi 5,25 persen. Alasannya, nilai tukar (kurs) rupiah stabil dan inflasi terjaga. Yakini?



Dalam konferensi per terkait hasil RDG-BI Bulan Juli 2025 di Gedung BI, Jakarta, Rabu (16/7/2025), Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pemangkasan BI-rate menjadi 5,25 persen, sejalan dengan makin rendahnya inflasi dan stabilnya nilai tukar. Menunjukkan semakin solidnya fundamental ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik," kata Perry.

Di samping suku bunga acuan (BI-Rate), lanjut Perry, bank sentral memutuskan untuk memangkas suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4,50 dan 6,00 persen.

Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit/ pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbagai langkah kebijakan bank sentral Indonesia antara lain penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik

melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri.

"Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan," kata Perry.

Selain itu, kebijakan BI juga

termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

"Hal ini dilakukan dengan memperkuat efektivitas transmisi

penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik," kata Perry. (wid,rls,ist/dya)

ARAH BAURAN DAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN BI:

- **Stabilisasi Rupiah:**
Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar spot, DNDF domestik, dan NDF luar negeri, serta pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
- **Operasi Moneter Pro-Pasar:**
- Perkuat transmisi penurunan suku bunga lewat penyesuaian struktur suku bunga instrumen dan swap valas, sambil menjaga daya tarik aset keuangan domestik.
- Jaga likuiditas melalui lelang SRBI dan pembelian SBN.
- Tingkatkan peran dealer utama dalam transaksi SRBI dan repo antar pelaku pasar.
- **Transparansi Kredit:**
Perkuat publikasi asesmen SBDK dengan fokus pada sektor prioritas dalam cakupan KLM.
- **Digitalisasi Pembayaran:**
- Perluas akseptasi QRIS: peluncuran kerja sama dengan Jepang dan sandbox dengan China (Agustus 2025).
- Sosialisasi QRIS Tanpa Pindai (TAP) ke pengguna dan merchant.
- **Kerja Sama Internasional:**
Perkuat konektivitas sistem pembayaran berbasis mata uang lokal serta dukung promosi investasi dan perdagangan sektor prioritas bersama instansi terkait.

IHSG Cerah, Mata Uang 'Garuda' Muram

PERDAGANGAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kurs rupiah sore ini bergerak berlawanan arah. Kondisi mata uang 'Garuda' alias rupiah sudah terpantau melemah sejak pagi.

Berdasarkan data RTI, Rabu, (16/7/2025), IHSG sore ditutup menguat 51,543 poin atau setara 0,72 persen ke posisi 7.192. IHSG sebelumnya sempat dibuka ke level 7.182. Sementara itu, IHSG juga berada di level terendah 7.079 dan tertinggi di posisi 7.142.

Adapun total volume saham yang telah diperdagangkan adalah 29,714 miliar senilai Rp16,540 triliun. Sore ini, tercatat sebanyak 351 saham bergerak menguat.

Sementara itu, sebanyak 250 saham melemah dan 201 saham lainnya stagnan. Sedangkan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12,871 triliun dengan frekuensi sebanyak 1.704.837 kali.

Sementara, kurs rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan sore ini juga fluktuatif. Sejak perdagangan pagi, rupiah terpantau bergerak fluktuatif.

Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 20,50 poin atau setara 0,13 persen hingga ke posisi Rp16.287 per USD dibandingkan sebelumnya di posisi Rp16.280 per

USD.

Namun demikian, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah menguat menjadi Rp16.116 per USD dibandingkan sebelumnya di posisi Rp16.276 per USD.

Sedangkan berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (disingkat Jisdor), mata uang Garuda ini terpantau berada di posisi Rp16.288 per USD.

Sedangkan di pasar surat utang negara, tekanan yang melanda mayoritas obligasi rupiah berangsur menurun. Yield 10Y turun 0,6 bps, bersama tenor 1Y, 4Y, 9Y, juga 12Y, 13Y, juga 18Y dan 40Y.

Sedangkan tenor 2Y masih naik tipis 0,2 bps bersama tenor 5Y yang juga naik 0,7 bps imbal hasilnya.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini terjadi imbas ketidakpastian ekonomi global pasca kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

"Ketidakpastian ekonomi global meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal Trump kepada negara mitra dagang, seperti Indonesia yang masih cukup besar terkena tarif impor 19 persen walaupun sebelumnya 32 persen. Oleh karena itu, BI kembali memangkas suku bunga acuan," kata Ibrahim dalam

keterangan tertulis.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global ini akan membuat pasar semakin khawatir atas kebijakan tarif AS sekaligus konflik internal yang terjadi antara Bank Sentral AS (The Fed) dengan Trump.

"Kekhawatiran pasar terus berlanjut atas tarif perdagangan Trump, dan meningkatnya seruan dari Trump dan sekutunya untuk menggulingkan Ketua Jerome Powell," tambahnya.

Ia pun memprediksi pergerakan Rupiah pada perdagangan Kamis 17 Juli 2025 akan bergerak fluktuatif, namun cenderung ditutup menguat di rentang Rp16.230 hingga Rp16.290 per dolar AS. (wid,rls,mol/dya)

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun ke-6 Dimulai 14 Juli Gubernur Khofifah Konsisten Ringankan Beban Masyarakat Setiap Tahun

SURABAYA- Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor, tradisi tiap tahun yang sudah memasuki tahun keenam ini dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat Jatim. Kali ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.

"Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa kembali dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ini bukan yang pertama kali tetapi telah rutin setiap tahun ada. Tahun ini merupakan tahun keenam penyelenggaraan pemutihan. Semoga bisa meringankan beban masyarakat Jatim," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Inder Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/7/2025).

Untuk itu, Gubernur Khofifah telah meneken dua Keputusan Gubernur (Kepgub) sekaligus. Yakni pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Khofifah mengatakan kebijakan ini ia ambil untuk dapat kembali meringankan beban masyarakat Jawa Timur, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan kendaraan sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Alhamdulillah keputusan gubernur telah saya tanda tangani, ini berkaitan dengan pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat Jawa Timur," jelasnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub Nomor: 100.3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025. Pembebasan pajak daerah atau biasa yang dikenal dengan pemutihan ini meliputi bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB

dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak tertentu. Untuk pemutihan ini mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025.

Untuk bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan bagi pemilik kendaraan roda dua wajib pajak kurang mampu yang datanya masuk dalam penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) serta wajib pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal sampai Rp500.000. Selain itu bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk wajib pajak ojek online.

"Yang ini mulai berlaku tanggal 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, jadi masyarakat Jawa Timur mari bisa segera memanfaatkan. Terutama bagi wajib pajak ojek online, yang masuk dalam P3KE, serta sepeda motor roda tiga pelaku usaha" terang Khofifah.

Khofifah optimistis, pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 691.913 objek dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp194.669.313.368,00.

Kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 1.619 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp1.190.207.491,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp2.888.471.543,00.

Lebih lanjut, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dimiliki oleh wajib pajak yang masuk dalam data P3KE, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 152.523 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp8.910.649.388,00,

diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp29.534.527.222,00.

Selanjutnya, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi online. Diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.334 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp2.216.072.170,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp3.291.729.000,00.

Sementara pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.004 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp1.365.302.715,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp655.371.045,00.

"Total sebanyak 878.392 obyek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp13.682.231.763,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 231.039.412.177,00," ungkap Khofifah.

Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 100.3.3.1/400/013/2025 tentang Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan

TAHUN KE-6

PEMBEBASAN PAJAK DAERAH 2025

MEMPERINGATI HUT KE-80 KEMERDEKAAN RI

14 - 31 JULI 2025 - 31 AGUSTUS 2025

BEBAS SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PKB DAN BBNKB

BEBAS PKB PROGRESIF

BEBAS DENDA & POKOK TUNGGAKAN PKB TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUMNYA

KERINGANAN DASAR PENGAJARAN PKB DAN BBNKB DIPERPANJANG

1 JULI 2025 - 31 DESEMBER 2025

TAMBAHAN KEBIJAKAN

KENDARAAN ANCIKUTAN UMUM SUBSIDI/NON SUBSIDI

PENCANAAN PKB & BBNKB TIDAK NAIK

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Keputusan ini diperpanjang mulai dari 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

Dalam keputusannya, Khofifah mengeluarkan tambahan kebijakan bahwa PKB dan BBNKB kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk pembayaran PKB kendaraan bermotor umum yang belum dapat memenuhi persyaratan, juga diberikan keringanan sehingga pengenaan sama dengan kendaraan bermotor umum yang mendapatkan subsidi.

"Ini berlaku 1 Juli hingga 31 Desember, akan lebih baik jika masyarakat segera memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," kata Khofifah.(adv)

Kemlu Singapura Tegaskan Riza Chalid Tak Berada di Negeranya

SINGAPURA -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Singapura buka suara terkait lokasi keberadaan pengusaha minyak, Riza Chalid, yang sempat disebut oleh Kejagung tengah berada di Singapura.

Juru bicara Kemlu Singapura menyebut bahwa berdasarkan data imigrasi, Riza Chalid tak berada di Singapura. Bahkan, disebut bahwa Riza Chalid sudah lama tidak memasuki Negeri Singa.

"Catatan imigrasi kami menunjukkan bahwa Muhammad Riza Chalid tidak berada di Singapura dan sudah lama tidak memasuki Singapura,"

tutur keterangan resmi juru bicara Kemlu Singapura, dikutip dari laman resminya, Rabu (16/7/2025).

Kemlu Singapura juga menekankan bahwa pihaknya siap membantu Kejagung terkait proses hukum terhadap Riza Chalid.

"Jika diminta secara resmi, Singapura akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional kami," ujar Kemlu Singapura.

Adapun Kejagung telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di

PT Pertamina Persero, Sub Holding, dan KKKS periode 2018-2023.

Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Kamis (10/7/2025) lalu. Dalam konferensi pers penetapan tersangka itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan Riza Chalid belum dilakukan penahanan. Sebab, Riza saat ini tengah berada di luar negeri, yakni Singapura.

Qohar mengungkapkan, Riza juga sudah 3 kali dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Namun ia mangkir dari seluruh panggilan tersebut.

Oleh karenanya, saat ini penyidik

tengah berupaya untuk menghadirkan Riza dengan berkoordinasi perwakilan kejaksaan di Singapura.

"Kerja sama dengan perwakilan kejaksaan di Singapura kami sudah ambil langkah-langkah karena infonya ada di sana, sudah kami tempuh untuk bagaimana kita temukan dan datangkan yang bersangkutan," ucap Qohar.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa Riza Chalid telah dicegah bepergian ke luar negeri per 10 Juli, bertepatan dengan penetapan Riza sebagai tersangka. (wid,rls,ist/dya)

Video Viral Toko Promosi Minuman Beralkohol Dikecam DPRD, Pemkot Malang Pastikan Tak Ada Izin Usaha



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat

Toko di Kota Malang yang mempromosikan minuman beralkohol (minol). (Santi/ist)

MALANG - Beredarnya video toko di Kota Malang yang mempromosikan minuman beralkohol (minol) mengejutkan khalayak. DPRD Kota Malang mengecam, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) tidak pernah menerbitkan izin usaha terkait penjualan minol di tempat usaha tersebut.

Sorotan itu disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, dalam rapat paripurna, Rabu (16/7/2025). Ia mengaku prihatin dengan beredarnya video promosi minuman beralkohol yang sempat diunggah oleh seorang selebgram di media sosial.

"Meskipun video itu sudah

dihapus, pesan yang tersampaikan kepada anak-anak muda cukup meresahkan. Saya harap Pemkot serius menindaklanjuti hal ini," ujar Arief.

Dalam video yang kini sudah diturunkan, terdapat cuplikan ajakan mengonsumsi minuman beralkohol dengan kalimat yang dinilai menyesatkan. "Arek enom kok ngombe es teh, arek enom iku ngombe alkohol," ujar sosok dalam video tersebut sambil mengarahkan penonton untuk membeli minuman beralkohol di sebuah toko yang disebutkan.

Diketahui toko tersebut bernama PT Sari Jaya 25 yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Lowokwaru.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan tidak pernah ada izin yang dikeluarkan Pemkot terkait penjualan minuman beralkohol oleh toko yang disebutkan dalam video tersebut.

"Tidak ada izin yang kami keluarkan terkait dengan minuman beralkohol itu. Bahkan, tadi pagi Satpol PP sudah mengecek lokasi," tegas Wahyu.

Wahyu juga menyayangkan promosi yang dilakukan pemilik toko melalui akun selebgram di media sosial. "Kami sudah ke sana, tapi

tokonya tutup. Sekarang yang kami telusuri adalah iklan yang beredar itu. Kami juga minta klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Satpol PP akan terus menertibkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebutkan dari sisi perizinan, usaha tersebut belum memenuhi ketentuan.

"Nomor Induk Berusaha (NIB) nya itu masih belum betul. Pengajuannya memang untuk eceran minuman beralkohol, tapi karena ini termasuk kategori risiko tinggi, mereka belum melampirkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Jadi, PKKPR dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) juga belum keluar. Belum saya keluarkan," kata Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan meninjau kembali pengajuan izin tersebut, terutama setelah munculnya persoalan iklan promosi minuman beralkohol yang sempat viral di media sosial. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Targetkan Tambah 3 Kampung Nila di 2025

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mempercepat upaya pembentukan Kampung Budidaya Nila di wilayahnya. Setelah menetapkan dua kampung budidaya, tahun ini ditargetkan ada tambahan tiga kawasan budidaya baru.

"Tahun ini kami targetnya akan mengusulkan tiga lagi. Sehingga kalau ditotal, pada 2025 ini sudah ada lima Kampung Budidaya Nila di Kabupaten Malang," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dikutip pada Rabu (16/7/2024).

Diketahui, pada awal 2025 lalu, Pemkab Malang telah menetapkan dua kampung budidaya nila yang telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Victor, kali ini tiga wilayah yang diusulkan tersebut, yakni Desa Sumber Ngepoh di Kecamatan Lawang, Desa Sananrejo di Kecamatan Turen, dan Desa Bangelan di Kecamatan Wonosari. Ketiga wilayah itu dinilai telah memiliki potensi pengembangan perikanan air tawar, khususnya budidaya ikan nila.

"Sebelumnya, kami sudah punya

dua Kampung Budidaya Nila yang telah mendapat SK dari Kementerian, yaitu di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, dan di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang," jelasnya.

Victor menambahkan, desa-desa yang diusulkan sebagai Kampung Budidaya Nila telah memiliki kolam ikan yang layak untuk dikembangkan. Salah satunya di Desa Sumber Ngepoh, yang saat ini memiliki luas kolam mencapai 1,1 hektare.

"Target kami, masing-masing kampung budidaya ini nantinya memiliki kolam seluas dua hektare. Itu yang sedang kami dorong melalui edukasi dan pendampingan, baik kepada pemerintah desa maupun kelompok-kelompok masyarakat atau petani ikan," katanya.

Dengan pembentukan kampung budidaya yang terpusat di beberapa wilayah, Victor optimistis pembinaan dapat dilakukan lebih efektif. Menurutnya, sistem pembinaan yang terpusat akan mempermudah pemenuhan kebutuhan sarana produksi, seperti pakan dan benih ikan.

"Kalau sudah terpusat, kebutuhan

pakan dan benih akan terkoordinasi dan volumenya bisa besar. Kalau volumenya besar, akan tercipta efisiensi. Bahkan kalau memungkinkan, mereka bisa memproduksi pakan sendiri secara mandiri," ungkapnya.

Di sisi lain, produksi ikan air tawar di Kabupaten Malang disebutkannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2024, total produksi ikan air tawar mencapai 12 ribu ton. Dari jumlah itu, sekitar 6.000 ton merupakan produksi ikan lele, 5.000 ton ikan nila, dan sisanya jenis ikan air tawar lainnya.

Dinilainya, pertumbuhan produksi perikanan ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Victor berharap, pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Malang ke depan dapat



Bupati Malang, Sanusi saat memanen ikan nila di Sumber Porong, Kecamatan Lawang. (dok. Prokopim Kab Malang)

berkontribusi lebih luas di tingkat nasional.

"Saat ini memang baru untuk memenuhi kebutuhan di Malang Raya. Tapi kami yakin, dengan upaya yang terus kami lakukan, ke depan produksi ikan air tawar dari Kabupaten Malang bisa memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Santi/Dya)

JELANG KTT BEIJING, UE-CHINA MEMANAS SOAL PERDAGANGAN

Kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk meredakan ketegangan dagang dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Cina di Beijing pekan depan tampaknya mengecil, menyusul keputusan Cina memangkaskan durasi pertemuan dari dua hari menjadi satu.



Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. (dts-Agentur/picture alliance)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini semula dirancang sebagai momentum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan Cina, dan awalnya dijadwalkan berlangsung di Brussel, Belgia. Namun, Presiden Cina Xi Jinping menolak untuk menghadiri undangan tersebut.

Kini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dijadwalkan menemui Xi atau Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing.

"Ini menjadi tanda lain terbatasnya kemauan dan ambisi Beijing untuk terlibat dengan Eropa," kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), kepada DW. Ia menambahkan, elite Cina kerap memandang Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan menengah dengan pengaruh terbatas dalam negosiasi dagang.

Selain itu, defisit dagang UE dengan Cina yang saat ini mencapai €400 miliar atau sekitar Rp6.900 triliun per tahun, merupakan sumber prahara terbesar. Jumlah defisit diperparah oleh terbatasnya akses produsen Eropa ke pasar Cina.

Perkaranya, kebijakan industri Cina cenderung menguntungkan produsen domestik lewat subsidi besar-besaran, kontrak pemerintah, dan regulasi yang memihak.

Pejabat UE menyebut kebijakan ini menyebabkan kelebihan kapasitas produksi, yang berujung pada "dumping" kendaraan listrik (EV) murah Cina ke pasar Eropa dan merugikan industri otomotif lokal.

"Skala ekonomi Cina, termasuk subsidi, kapasitas berlebih, dan intervensi pemerintahnya, sangat besar," ujar Bachulska, seraya memperingatkan bahwa tanpa "langkah serius" untuk melindungi industri otomotif Eropa, UE berisiko mengalami "deindustrialisasi parsial"

dalam beberapa tahun ke depan.

UE telah memberlakukan tarif hingga 45% pada EV asal Cina, serta menuntut pembatasan produksi dan pembukaan akses pasar yang setara bagi impor dari UE.

Sebaliknya, Cina mengusulkan penggantian tarif dengan komitmen harga minimum serta konsesi lainnya.

Pada April lalu, kekhawatiran atas praktik dagang Cina ini mendorong UE membentuk Satuan Tugas Pengawasan

Impor untuk melindungi pasar dalam negeri. Gugus tugas ini bisa memicu diberlakukannya bea anti-dumping atau langkah perlindungan lain dari UE.

Satuan tugas itu mencatat adanya lonjakan ekspor Cina ke UE sebesar 8,2% pada April dibandingkan tahun 2024, yang diduga akibat pengalihan ekspor Cina dari Amerika Serikat (AS) ke UE untuk menghindari tarif Donald Trump.

Cina membantah telah memberi keuntungan khusus kepada produsen domestik dan sebaliknya menuduh UE melakukan proteksionisme. Beijing membenarkan kebijakannya dengan dalih keamanan nasional dan pembangunan ekonomi.

Tak hanya itu, saat negosiator UE gagal membuka akses signifikan ke pasar Cina, dominasi Beijing atas pasokan logam tanah jarang, yang merupakan bahan penting untuk teknologi bersih, cip, dan peralatan medis, menjadi sumber konflik besar lainnya.

Menurut Komisi Eropa, 98% pasokan logam tanah jarang dan magnet tanah jarang UE berasal dari Cina.

Pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan Cina tahun lalu itu menyebabkan gangguan rantai pasok dan penghentian produksi di berbagai perusahaan Eropa. Nilai ekspor logam tanah jarang dari Cina ke UE pun anjlok 84% menjadi hanya \$15,1 juta (sekitar Rp246 miliar) dalam lima bulan pertama 2025, menurut data bea cukai Cina. (DW,ist/dya)

Transaksi Dagang BRICS Tembus Rp13.912 Triliun

SELAMA enam bulan pertama tahun ini, China mencatatkan nilai perdagangan sebesar 6,11 triliun yuan, atau sekitar Rp13.912 triliun, dengan negara-negara anggota BRICS. Volume perdagangan antara anggota dan mitra BRICS tumbuh 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola kerja sama ekonomi, di mana aliansi tersebut semakin memperkuat hubungan dalam perdagangan dan transaksi lintas batas.

Selain negara-negara BRICS, China juga telah mengusulkan untuk membangun platform perdagangan digital baru dengan negara-negara SCO. Usulan ini diumumkan dalam Dialog Walikota Global SCO yang sedang berlangsung di Tianjin, China pada Selasa (16/7/2025). Perubahan signifikan ini dapat mempengaruhi dolar AS karena platform perdagangan digital dapat melewati USD untuk pembayaran.

Direktur Departemen Statistik dan Analisis Administrasi Umum Bea Cukai China, Lu Daliang, mengkonfirmasi bahwa China melakukan transaksi bisnis dengan

anggota BRICS senilai USD855 miliar.

"Pada paruh pertama tahun ini, omset perdagangan China dengan anggota BRICS dan negara mitra lainnya mencapai 6,11 triliun yuan, mewakili peningkatan 3,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ungkap Daliang dalam konferensi pers, dikutip dari Watcher Guru, Rabu (16/7/2025).

Global South membentuk kembali cara pandang dunia terhadap perdagangan dan transaksi yang selama beberapa dekade didominasi oleh Barat. Negara-negara BRICS dan mitranya menyumbang sekitar 28% dari perdagangan luar negeri China dalam enam bulan pertama tahun 2025. Hal ini menyoroti kemitraan ekonomi yang kuat di antara para anggota dengan peningkatan kerja sama dalam perdagangan lintas batas.

Omset China sebesar USD855 miliar dari anggota BRICS tersebut berasal dari pasokan bahan kimia, metalurgi, elektronik, dan produk industri lainnya. Selain itu, China telah meningkatkan pasokan peralatan petrokimia dan mesin-mesin pengerjaan logam ke negara-

negara anggota. Peningkatan mesin pemaman dan pemintal kapas juga masuk ke dalam daftar perdagangan tahun ini.

Tak Hanya itu, Perekonomian China tumbuh 5,2% pada kuartal kedua 2025, menunjukkan ketahanan model ekspor di tengah tekanan tarif AS. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul keretakan ekonomi berupa keterlambatan pembayaran kontrak dan tagihan, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan utilitas yang terilit utang. Persaingan global yang ketat turut menekan laba industri dan memicu deflasi di tingkat pabrik, meskipun volume ekspor meningkat.

Tekanan finansial ini berdampak langsung pada pekerja, dengan pemotongan gaji dan keterlambatan pembayaran upah menjadi hal umum. Beberapa pekerja bahkan terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Di sektor industri, tunggakan pembayaran meningkat signifikan—16,6% di sektor elektronik dan 11,2% di otomotif hingga Mei, melampaui rata-rata industri sebesar 9%. (Watcher Guru, ist/nei)



Berenang Rutin

Sehat Fisik dan Mental Terjaga

Renang bukan sekadar kegiatan seru di tengah cuaca panas, tetapi juga termasuk salah satu jenis olahraga terbaik yang cocok untuk berbagai kelompok usia. Daya apung air membantu mengurangi tekanan pada sendi, menjadikan olahraga ini rendah risiko cedera. Di balik kesenangan saat berada di dalam air, tersimpan beragam manfaat kesehatan yang bisa dirasakan jika dilakukan secara rutin.

Berbeda dengan olahraga seperti lari atau angkat beban, renang menggerakkan hampir seluruh otot tubuh secara bersamaan—mulai dari kaki, tangan, hingga otot inti. Tak heran jika banyak atlet dan fisioterapis memasukkan renang ke dalam program pemulihan atau latihan silang (cross-training).

Menjadikan renang sebagai rutinitas tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas emosional dan mental. Berikut adalah berbagai manfaat renang secara rutin yang sayang untuk dilewatkan:

Meningkatkan Kesehatan Jantung dan Paru-Paru

Renang merupakan jenis olahraga kardio yang efektif untuk meningkatkan denyut jantung dan melatih sistem pernapasan. Gerakan tubuh saat berenang membuat jantung bekerja lebih keras memompa darah, sehingga memperkuat otot jantung

sekaligus meningkatkan efisiensi sistem peredaran darah. Selain itu, renang juga melatih kapasitas paru-paru agar lebih optimal dalam menyerap oksigen.

Menurunkan Berat Badan

Berenang selama 30 menit dapat membakar antara 200 hingga 400 kalori, tergantung pada intensitas dan gaya renang yang dilakukan. Gaya renang seperti gaya kupu-kupu atau gaya bebas dengan kecepatan tinggi cenderung membakar lebih banyak kalori dibandingkan gaya punggung atau gaya dada yang lebih santai.

Karena dilakukan di dalam air, berenang memberikan resistensi alami yang membantu membangun kekuatan otot, sekaligus mengurangi tekanan pada sendi. Hal ini menjadikan renang sebagai pilihan olahraga yang ideal bagi siapa pun yang ingin menurunkan berat badan dengan cara yang lebih aman dan minim risiko cedera.

Melatih Seluruh Otot Tubuh

Setiap gaya renang mengharuskan koordinasi berbagai kelompok otot, mulai dari lengan, kaki, punggung, hingga otot inti. Gerakan yang berulang dan terkontrol saat berenang membuat seluruh tubuh aktif bekerja secara harmonis, sehingga memberikan manfaat latihan yang menyeluruh. Karena melibatkan hampir seluruh bagian tubuh, renang

efektif dalam membentuk postur tubuh yang proporsional dan seimbang.

Meningkatkan Kekuatan Otak

Olahraga secara umum telah lama dikaitkan dengan peningkatan fungsi kognitif, termasuk memori, konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Aktivitas fisik seperti berenang mampu meningkatkan aliran darah ke otak, yang berkontribusi pada performa mental yang lebih baik dan peningkatan suasana hati.

Sebuah penelitian kecil yang diterbitkan di *Physiological Reports* menunjukkan bahwa peserta yang melakukan renang dengan intensitas sedang selama 20 menit mampu memproses informasi visual dan merespons lebih cepat dalam tes kognitif setelah sesi berenang.

Meredakan Stres

Renang dikenal memiliki efek meditatif berkat gerakannya yang ritmis dan menenangkan. Saat berenang, fokus pada pola napas dan irama gerakan menciptakan suasana yang mirip dengan meditasi, sehingga membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan mental.

Banyak orang merasa lebih tenang, rileks, bahkan tidur lebih nyenyak setelah berenang. Olahraga ini terbukti dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sekaligus merangsang pelepasan endorfin.

Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Rutin berenang dapat memberikan dampak positif terhadap sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten, seperti berenang, membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga nutrisi dan oksigen dapat tersebar lebih efektif ke seluruh tubuh.

Dengan tubuh yang aktif bergerak dan aliran darah yang lancar, sistem imun menjadi lebih siap dalam mendeteksi dan melawan infeksi.

Meningkatkan Konsentrasi dan Fokus

Berenang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan konsentrasi dan fokus. Saat berenang, tubuh dituntut untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi sambil menjaga ritme pernapasan dan memperhatikan teknik yang digunakan.

Kombinasi antara gerakan fisik, kontrol napas, dan kesadaran tubuh ini melatih otak untuk tetap fokus dan bekerja secara efisien. Aktivitas ini juga membantu meredakan stres dan kejenuhan mental, sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan konsentrasi yang lebih baik.

Renang bukan hanya olahraga yang menyegarkan, tapi juga menawarkan banyak manfaat kesehatan fisik dan mental jika dilakukan secara rutin. (nei,ist/dya)

MARK ZUCKERBERG: META BANGUN DATA CENTER AI 5 GW



Meta dilaporkan sedang mengembangkan pusat data AI bernama Hyperion. CEO Meta, Mark Zuckerberg, memperkirakan fasilitas ini akan memiliki kapasitas komputasi sebesar 5 gigawatt (GW), sebagai upaya untuk bersaing dengan OpenAI dan Google dalam persaingan teknologi kecerdasan buatan.

Sebelumnya, Meta merekrut sejumlah talenta unggulan untuk memperkuat Meta Superintelligence Lab, termasuk mantan CEO Scale AI, Alexandr Wang, dan mantan CEO Safe Superintelligence, Daniel Gross.

Kini, Meta memfokuskan perhatiannya pada pengembangan kapasitas komputasi besar guna melatih model-model AI yang masih dalam tahap awal perkembangan.

Dikutip Tech Crunch, Juru bicara Meta, Ashley Gabriel, mengatakan bahwa Hyperion akan berlokasi di Louisiana, kemungkinan di Richland Parish, AS. Ini merupakan wilayah yang sebelumnya disebut Meta jadi lokasi proyek pembangunan data center senilai 10 miliar dolar AS.

Pada tahap awal, Meta menargetkan pengoperasian pusat data berkapasitas dua gigawatt pada

tahun 2030. Kapasitas tersebut direncanakan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai lima gigawatt dalam beberapa tahun berikutnya, seiring dengan kebutuhan komputasi yang semakin besar untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, Meta juga berencana meluncurkan super cluster berkekuatan 1 gigawatt bernama Prometheus pada tahun 2026. Super cluster ini diproyeksikan menjadi salah satu yang pertama di dunia dalam mengelola pusat data AI sebesar itu. Prometheus akan dibangun di New

Albany, Ohio, Amerika Serikat, dan menjadi bagian penting dari strategi Meta dalam memperkuat infrastruktur AI mereka.

Pembangunan pusat data AI oleh Meta diperkirakan akan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut terhadap pemain besar lainnya seperti OpenAI, Google DeepMind, dan Anthropic. Dengan kapasitas komputasi yang masif, Meta akan memiliki keunggulan dalam melatih serta mengoperasikan model-model AI canggih di masa depan.

Langkah ini juga dipandang strategis untuk menarik lebih banyak talenta di bidang AI. Para ahli dan peneliti kemungkinan besar akan tertarik bergabung dengan perusahaan yang menyediakan infrastruktur komputasi memadai, yang memungkinkan mereka mengembangkan teknologi AI secara maksimal di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Pemerintahan Trump saat ini mendukung pembangunan data center AI pada industri teknologi. Presiden Donald Trump misalnya membantu OpenAI mengumumkan proyek Stargate-nya, dan sejak itu berbicara tentang upaya untuk memperluas infrastruktur AI AS.

Dengan dukungan pejabat federal, industri AI AS diprediksi bakal menyedot sebagian besar pasokan energi Amerika di tahun-tahun mendatang. Beberapa ahli memperkirakan bahwa pusat data dapat menyumbang 20% dari konsumsi energi Amerika pada tahun 2030, naik dari hanya 2,5% pada tahun 2022. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tenun & Kain Polos

Paduan Anggun yang Memikat

Perempuan Indonesia saat ini semakin gemar mengenakan baju tenun yang dikombinasikan dengan kain polos sebagai pilihan utama untuk tampil elegan dengan nuansa tradisional. Perpaduan antara motif tenun yang kaya akan nilai budaya dan kesan sederhana dari kain polos menciptakan tampilan yang serasi dan menarik. Model busana ini tak hanya cocok untuk acara-acara formal, tetapi juga nyaman dikenakan dalam aktivitas sehari-hari karena fleksibilitasnya.

Tren fashion yang terus berkembang menghadirkan berbagai inovasi desain yang segar dan kreatif. Paduan antara tenun dan kain polos memberikan sentuhan modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Berkat gaya yang fleksibel, tampilan yang dihasilkan pun bisa disesuaikan dengan mudah, baik untuk acara formal maupun kasual, sesuai dengan kebutuhan dan suasana.

Berikut ini terdapat tujuh model baju tenun yang kombinasi kain polos yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda:

Tunik Tenun Lengan Balon

Model tunik selalu menjadi pilihan yang aman dan terlihat anggun, terutama ketika dipadukan dengan lengan balon dari kain yang lembut dan polos. "Sentuhan balon pada lengan memberi volume dan kesan feminin," sementara pada bagian tengah, motif tenun tetap menjadi identitas utama yang mendominasi penampilan.

Baju ini sangat ideal bagi Anda yang ingin tampil sopan namun tetap terlihat stylish. Kombinasi warna netral dan earthy, seperti broken white, sage green, atau coklat susu, semakin menambah kesan elegan

Blouse Ruffle Tenun Kerah Polos

Blouse ruffle selalu memiliki tempat istimewa dalam dunia fashion karena dapat menciptakan kesan dinamis dan feminin. Ketika bagian utama blouse terbuat dari kain tenun bermotif dengan kerah kecil yang terbuat dari bahan polos, kesan formal kasual pun langsung muncul.

Model ini sangat cocok untuk digunakan dalam situasi semi-formal seperti di kantor atau saat menghadiri pertemuan komunitas. Kerah polo menambahkan elemen yang tegas, namun tetap memberikan nuansa lembut berkat kenyamanan bahan yang digunakan.

Outer Tenun Polos Sempel

Outerwear yang terbuat dari bahan tenun memberikan kesan yang kuat dan berkarakter. Di sisi lain, penggunaan kain polos pada bagian dalam atau lengan memastikan bahwa pakaian ini tetap terasa ringan dan nyaman saat dikenakan. Desain yang dihadirkan memungkinkan pemakainya untuk bergerak dengan leluasa, sekaligus tampil mencolok di tengah keramaian. Outer ini sangat cocok dipadukan dengan tank top atau blouse polos, menciptakan efek layering yang menarik.

Efek layering ini sangat ideal untuk berbagai acara semi-formal seperti pameran, seminar, atau pertemuan yang lebih santai. Warna-warna pilihan seperti hitam, khaki, atau navy akan semakin menonjolkan kesan modern dari outerwear ini.

Dress Midi Tenun Pinggang Polos

Dress midi selalu menghadirkan nuansa feminin dan teratur, terutama ketika motif tenun diterapkan di bagian atas sementara bagian bawahnya menggunakan kain elastis yang polos. Kombinasi ini menciptakan siluet tubuh yang anggun

tanpa memberikan kesan kaku.

Dress ini sangat ideal untuk dikenakan pada acara siang hari, pesta adat modern, atau bahkan pertunjukan mode dengan tema etnik. Kain polos yang digunakan di bagian bawah memberikan kenyamanan dalam bergerak, sedangkan tenun di bagian dada tetap memberikan kesan elegan.

Kemeja Polo Tenun Unisex

Kemeja unisex merupakan pilihan ideal bagi individu yang menginginkan penampilan yang netral namun tetap stylish. "Panel tenun bisa diaplikasikan di bagian saku, dada, atau belakang kemeja, sementara sisa badan menggunakan kain polo polos." Model ini sangat fleksibel dan dapat dikenakan oleh pria maupun wanita.

Dengan potongan loose fit, kemeja ini memberikan kenyamanan saat digunakan sepanjang hari, terutama dalam kegiatan di luar ruangan seperti acara komunitas atau bazar UMKM. Untuk menciptakan tampilan kasual, Anda dapat memadukannya dengan celana chino atau jeans berwarna gelap. Sementara itu, jika ingin tampil lebih formal, kemeja ini dapat dipadukan dengan blazer atau outer yang memiliki tekstur menarik.

Gamis Tenun Polo Minimalis

Gamis panjang yang dilengkapi dengan elemen tenun dapat menciptakan tampilan yang elegan sekaligus menjaga aurat dengan baik. Kombinasi penggunaan kain polos memastikan gamis ini tidak memberikan rasa panas atau berat, sehingga sangat ideal untuk berbagai aktivitas sepanjang hari.

Untuk bagian dada atau manset tangan, penggunaan tenun dengan motif khas

dari daerah tertentu dapat menjadi cerminan identitas budaya. Sementara itu, bagian rok atau lengan panjang dapat menggunakan kain polos dengan warna yang harmonis, menciptakan kesan yang seimbang dan menarik.

Kebaya Tenun

Kebaya modern dengan bagian bodi dari tenun dan lengan dari kain polos organza menghasilkan kesan tradisional yang segar. Organza memberi efek mengembang dan elegan tanpa berat. Model ini ideal untuk acara resepsi atau lamaran, terutama jika kamu ingin menonjolkan unsur budaya tanpa terlihat tua. (nei,ist/dya)



Cak Imin dan (dari Hal 1) ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tetap membuka peluang untuk memanggil Cak Imin dan Hanif Dhakiri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut usai pemeriksaan terhadap dua mantan Staf Khusus Menaker era Hanif Dhakiri, yakni Maria Magdalena dan Nur Nadlifah, pada Selasa (15/7/2025).

"Semua terbuka kemungkinan karena penyidik tentu masih melakukan penyidikan, baik dari beberapa praktik dugaan pemerasan yang terjadi pada era saat ini, yang kemudian membuka peluang bagi penyidik untuk melihat apakah praktik-praktik pemerasan juga terjadi pada era-era sebelumnya. Tentu hal itu sangat terbuka," ujar Budi, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia. Bila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat, sehingga para tenaga kerja asing akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

Lebih detail lagi, KPK mengungkapkan kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009-2014. Kemudian juga berlanjut pada masa Hanif Dhakiri 2014-2019, dan mada Ida Fauziyah pada 2019-2024.

Terbaru, KPK memanggil kembali mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA itu. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama CRC, LH, dan RHT, mantan Stafus Menaker," ujar Budi.

Ketiga saksi tersebut telah hadir di Gedung Merah Putih KPK secara bertahap. LH tiba pukul 09.21 WIB, kemudian disusul RHT pada pukul 10.08 WIB, dan tak lama kemudian atau pada pukul 10.11 WIB, CRC datang.

LH diketahui Luqman Hakim merupakan mantan Stafus Menaker Hanif Dhakiri. Dia juga sempat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Kemudian, CRC adalah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa merupakan mantan Stafus Menaker Ida Fauziyah, dan Risharyudi Triwibowo (RT) saat ini menjabat sebagai Bupati Buol, Sulawesi Tengah.

Selain ketiga saksi tersebut, KPK juga memeriksa memanggil sejumlah saksi yang yaitu anggota Komisi XIII

DPR RI Mafirion, anggota DPR RI periode 2019-2024 Nur Nadlifah, dan Maria Magdalena S. Ketiganya merupakan mantan Stafus Menaker era Hanif Dhakiri pada Selasa (15/7/2025).

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MFR, mantan staf khusus menteri ketenagakerjaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (15/7/2025).

Sementara itu, ketiganya diketahui sempat menjadi Stafus Menaker era Hanif Dhakiri. Kemudian khusus Nur Nadlifah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Kronologi

KPK mengungkapkan dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan yang berlangsung pada 2019-2024. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya staf ahli menteri, dengan total nilai pemerasan mencapai Rp 53,7 miliar.

Dugaan pemerasan RPTKA diterima pejabat dan pegawai Kemenaker, baik yang telah menjadi tersangka maupun tidak. Jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA sekurang-kurangnya adalah Rp 53,7 miliar.

Tersangka Suhartono (SH), Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) Kemenaker 2020-2023, diduga menerima sekurang-kurangnya Rp 460 juta. Lalu, Haryanto (HY), Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker 2024-2025, diduga menerima sekurang-kurangnya Rp 18 miliar. Ia kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional.

Mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja Haryanto se usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2025). KPK memanggil 4 orang mantan pejabat di lingkungan direktorat jenderal Kemenaker untuk pemeriksaan atas kasus gratifikasi atau pemerasan di Kemenaker terhadap tenaga kerja asing. Empat mantan pejabat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Selain memeriksa keempat orang tersebut, KPK juga menyita 8 mobil dan 1 sepeda motor terkait kasus ini untuk digunakan sebagai pemeriksaan.

Kemudian, Wisnu Pramono (WP), Direktur PPTKA Kemenaker 2017-2019, menerima sekurang-kurangnya Rp 580 juta. Lalu, Devi

Anggraeni (DA), Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 yang juga Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025, menerima sedikitnya Rp 2,3 miliar.

Sedangkan, Gatot Widiartono (GTW) juga menerima sekurang-kurangnya Rp 6,3 miliar selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA Kemenaker 2021-2025. Sementara itu, tiga anggota staf pada Direktorat PPTKA, yaitu Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF), yang semua bertugas pada 2019-2024, masing-masing menerima sedikitnya Rp 13,9 miliar, Rp 1,1 miliar, dan Rp 1,8 miliar.

Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA sekurang-kurangnya adalah Rp 53,7 miliar.

Untuk diketahui, RPTKA adalah izin penggunaan TKA yang diterbitkan Kemenaker. Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Dokumen Pengesahan RPTKA. Pengurusan RPTKA dilakukan di Direktorat PPTKA Keditjen Binapenta dan PKK Kemenaker. Pengajuannya secara daring menghasilkan dua dokumen, yakni hasil penilaian kelayakan (HPK) dan pengesahan RPTKA, yang diverifikasi berjenjang.

Dalam proses tersebut, sejumlah pihak Kemenaker melalui pegawai Direktorat PPTKA melakukan pemerasan kepada para pemohon. Tersangka Suhartono, Wisnu Pramono, Haryanto, dan Devi Anggraeni memerintahkan verifikator Putri Citra Wahyoe, Alfa Eshad, dan Jamal Shodiqin meminta anggaran RPTKA disetujui.

Tersangka Haryanto mengaku telah menyerahkan seluruh data perusahaan dan nama-nama tenaga kerja asing atau TKA yang menjadi korban pemerasan kepada penyidik KPK. Hal tersebut diungkapkannya se usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025) lalu.

Adapun Haryanto diperiksa dan menjadi tersangka karena jabatannya selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker 2024-2025. Ia diduga menerima uang hasil pemerasan paling besar, sekurang-kurangnya Rp 18 miliar.

Dalam kesempatan itu, Haryanto menyatakan bahwa pemeriksaannya kali ini hanya untuk melengkapi keterangan sebelumnya. Ia kali ini diperiksa sebagai saksi. Selain itu, dokumen yang dibawanya dalam

sebuah boks diklaim hanya "kertas tak terpakai".

Di sisi lain, Haryanto mengonfirmasi bahwa daftar nama TKA dan perusahaan yang menjadi korban pemerasan telah diserahkan sejak awal proses penyidikan. "Sudah kami serahkan (nama TKA-nya) semua itu, dari awal. Iya (nama perusahaan agennya juga), ha'ah, makasihya," tuturnya.

Selain Haryanto, KPK juga memeriksa tersangka lainnya, seperti Suhartono (SH), Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker 2020-2023, yang menerima sekurang-kurangnya Rp 460 juta. Kemudian, Wisnu Pramono (WP), Direktur PPTKA Kemenaker 2017-2019, menerima sekurang-kurangnya Rp 580 juta.

Saat ditanya se usai pemeriksaan, Wisnu Pramono enggan berkomentar. Ia memilih bungkam dan melambatkan tangan menandakan penolakan untuk menjawab pertanyaan.

Kasus pemerasan di Kemenaker ini terkait dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Para tersangka diduga memperlambat proses verifikasi dan penerbitan RPTKA bagi perusahaan yang tidak memberikan "uang pelicin". Jika RPTKA tidak terbit, perusahaan akan dikenakan denda harian yang besar untuk setiap TKA sehingga memaksa mereka untuk membayar sejumlah uang kepada para oknum.

Dalam kasus ini KPK juga telah menyita 11 mobil dan 2 sepeda motor terkait kasus tersebut dalam kurun waktu tahun 2020-2023.

Di sisi lain, seiring dengan proses penyidikan, KPK menemukan praktik pemerasan terhadap TKA setidaknya sudah berlangsung sejak 2012. Sehingga, KPK membuka kemungkinan memanggil para menteri yang bertugas sepanjang kasus dugaan pemerasan terjadi. Mereka diharapkan bisa memberikan klarifikasi. Terdapat tiga menteri yang menjabat dalam periode tersebut yang seluruhnya merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), antara lain, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009-2014), Hanif Dhakiri (2014-2019), dan Ida Fauziyah (2019-2024).

KPK terus menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan praktik serupa di Imigrasi, dan akan mengembangkan kasus ini ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mempermudah pemulihan aset.

Peneliti dari Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, menyampaikan, kasus di Kemenaker mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola perizinan. Proses pengurusannya minim transparansi dan terlalu banyak diskresi. "Bagi kami, ini harus reformasi menyeluruh. Bukan hanya di level sanksi, tapi harus menyentuh sistemnya," katanya. (ant,ist/lut)



AS TETAPKAN TARIF 19% PADA INDONESIA, SIAPA YANG UNTUNG?

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan mengenakan tarif sebesar 19 persen atas ekspor Indonesia ke negara tersebut. Tarif itu turun dari yang ditetapkan Trump sebelumnya yaitu 32%. Lantas, siapa yang diuntungkan?

tidak akan membayar tarif apa pun, mereka membeli kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini. Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia," jelasnya.

Atas kesepakatan tersebut, Trump mengatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi AS senilai US\$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS), pada Selasa (15/7/2025).

"Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai \$15 Miliar, Produk Pertanian Amerika senilai \$4,5 Miliar, dan 50 Jet Boeing, banyak di antaranya adalah Boeing 777," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip AFP, Rabu (16/7/2025).

Trump mengatakan kesepakatan tersebut telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. Trump awalnya mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai

penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025.

Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke AS hingga US\$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS) agar lolos dari serangan tarif 32 persen itu.

Sejumlah negara juga dihajar AS dengan tarif impor tinggi, seperti Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Malaysia untuk negara di kawasan ASEAN.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan melalui akun Instagramnya @prabowo, ia mengatakan memang telah melakukan pembicaraan dengan Donald Trump lewat telpon. Dari pembicaraan itu, ia dengan Trump sepakat membawa hubungan dagang antara Indonesia dengan AS ke era baru.

"Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membangun perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar," tulisnya di Instagram @prabowo, Rabu (16/7/2025).

Turunnya tarif impor untuk Indonesia nyatanya diberi catatan khusus. Indonesia harus rela memberikan akses penuh bagi Pemerintah AS terhadap berbagai sumber daya, termasuk tambaga.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai hasil kesepakatan dagang antara Indonesia

dan AS terkait tarif resiprokal cenderung merugikan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menyatakan, dalam kesepakatan tersebut, produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dikenakan tarif impor sebesar 19 persen. Hal itu terbaik dengan produk asal AS yang masuk ke Indonesia karena dibebaskan dari bea masuk alias 0 persen.

"Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS, karena hasil negosiasi tarif ini tetap merugikan posisi Indonesia," kata Bhima, Rabu (16/7/2025).

Bhima mengakui sejumlah produk ekspor utama Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit (CPO), dan karet diuntungkan karena tarifnya turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Namun, menurutnya, keuntungan itu tidak sebanding dengan potensi lonjakan impor dari AS ke Indonesia.

Ia menyebutkan, dengan pembebasan tarif untuk produk AS, maka barang-barang seperti minyak dan gas bumi (migas), elektronik, suku cadang pesawat, sereal seperti gandum, dan produk farmasi akan membanjiri pasar domestik.

"Sepanjang 2024, total impor lima komoditas utama dari AS ini mencapai USD 5,37 miliar atau setara Rp87,3 triliun. Jumlah itu bisa meningkat signifikan pasca kebijakan tarif 0 persen," ujarnya.

Bahkan, menurutnya, kesepakatan tersebut bisa berdampak negatif pada ketahanan pangan nasional karena target swasembada pangan bisa terganggu. Terutama karena penetrasi produk pangan AS seperti gandum semakin besar akibat bebas tarif.

"Memang harga mie instan dan roti mungkin akan turun, tetapi dampaknya terasa pada produsen lokal. Petani dan pelaku industri pangan dalam negeri bisa tertekan," jelasnya.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini justru dapat memicu ketergantungan baru pada bahan baku pangan dan energi dari luar negeri terutama dari Amerika Serikat, yang bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi. Sebagai solusi, Bima mendorong pemerintah untuk segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor, khususnya ke Eropa dan kawasan ASEAN. (ant,ist/lut)



"Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS, karena hasil negosiasi tarif ini tetap merugikan posisi Indonesia,"

BHIMA YUDHISTIRA

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)

"Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apapun ... kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan," kata Trump, Selasa (15/7/2025), dilansir Reuters.

"Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apapun ... kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan," kata Trump, Selasa (15/7/2025), dilansir Reuters.

Kemudian, melalui akun Truth Social miliknya, Trump menulis, "Kesepakatan Besar, untuk semua orang, baru saja membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya membuat kesepakatan langsung dengan Presiden mereka yang paling dihormati.

"Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas. Dan kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya," kata Trump di Halaman Gedung Putih, AS, Selasa (15/7).

Trump juga menyatakan beberapa incaran pada Indonesia dalam kesepakatan tersebut. "Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tambaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu. Kami